

Bandung Magoo Fest 2025: Edukasi Pengelolaan Sampah dan Ajang Silaturahmi Penggiat Maggot

Category: News

8 November 2025



Bandung Magoo Fest 2025: Edukasi Pengelolaan Sampah dan Ajang Silaturahmi Penggiat Maggot

Prolite – Taman Fitness, Kota Bandung, diramaikan oleh gelaran Bandung Magoo Fest 2025. Acara ini tidak hanya menjadi pameran produk organik dan hiburan keluarga, tetapi juga menjadi sarana edukasi penting serta ajang silaturahmi bagi para penggiat pengelolaan sampah, khususnya melalui maggot.

Acara ini dihadiri oleh berbagai komunitas dan partisipan UMKM yang fokus pada isu lingkungan dan daur ulang sampah. Mereka memamerkan berbagai inovasi, mulai dari pupuk organik hingga cenderamata yang membuktikan bahwa sampah dapat memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola dengan benar.

Antusiasme terlihat jelas dari para partisipan. UMKM dari Sadang Serang, Usmyati dan Herlan mengungkapkan, acara ini memiliki manfaat lebih dari sekadar pameran.

“Manfaatnya kita bisa saling ketemu dengan sesama penggiat maggot. Terus saling sharing juga tentang ngolah sampahnya gimana, yang lebih bagus lagi, yang lebih masyarakat tertarik,” ujar Usmyati saat diwawancara di lokasi.

Herlan menambahkan, interaksi antar komunitas ini sangat penting untuk kemajuan bersama.

“Jadi apa yang kita tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu makin akan lebih tahu lagi, lebih maju ke depan. Kita jadi banyak inovasi,” timpalnya.

Keduanya berharap acara ini dapat diselenggarakan secara konsisten untuk mengedukasi warga secara lebih luas tentang pemilahan dan pengolahan sampah.

“Harapannya mah agar sampah itu bisa selesai di wilayah RW. Jadi enggak usah buang-buang ke TPS,” tegas Usmyati. “Jadi masyarakat itu sendiri sadar akan sampah,” tambah Herlan.

Dampak positif acara ini juga dirasakan langsung oleh pengunjung. Salman, salah seorang pengunjung mengaku, acara ini berhasil mengubah pandangannya dan menarik minatnya pada isu yang sebelumnya ia anggap tidak menarik.

“Saya sebagai masyarakat, dari diadakannya acara ini kan bisa bermanfaat juga ya. Jadi dari edukasi pengurangan sampah organik, pencegahan pencemaran, sama edukasi yang lainnya juga,” ungkap Salman.

Salman pun berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat diperbanyak di kemudian hari.

“Harapannya mungkin lebih sering lah ya yang ini biar masyarakat lebih teredukasi lagi, biar pada ilmunya,” tutupnya.

Bandung Magoo Fest 2025 menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah dapat dikemas secara menarik dan menyenangkan, sekaligus mendorong kolaborasi antarwarga untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Muhammad Farhan Ajak Generasi Muda Pahami Nilai dan Jati Diri Rupiah

Category: News
8 November 2025



Muhammad Farhan Ajak Generasi Muda Pahami Nilai dan Jati Diri Rupiah

Prolite – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak generasi muda untuk lebih mencintai dan memahami nilai rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Rupawan: Rupiah dan Pahlawan yang digelar di Telkom University Convention Hall, Bandung, Jumat 7 November 2025.

“Anak-anak muda zaman sekarang itu hidup masa kecilnya jauh lebih mudah dibanding generasi kita dulu. Maka jangan harap mereka tangguh menghadapi kesusahan seperti dulu. Tapi di sisi lain, mereka punya cara berpikir yang lebih kreatif untuk mencari solusi,” ujar Muhammad Farhan.

Muhammad Farhan menilai, kunci memahami generasi muda adalah mengetahui kapan mereka merasa berguna.

“Kalau mereka lagi semangat bekerja, kasih kerjaan sebanyak-

banyaknya. Mereka bisa bekerja tanpa kenal waktu. Tapi kalau lagi tidak cocok, alihkan dulu ke hal lain yang mereka suka," jelas Muhammad Farhan.

Menurutnya, pola pikir anak muda perlu didekati dengan cara yang memiliki keterikatan dengan keseharian mereka.

"Buat anak-anak zaman sekarang, bukan soal informasinya penting atau tidak, tapi 'relate' enggak sama aku. Jadi kalau mau menanamkan nilai-nilai, tunjukkan dulu value-nya. Misalnya dalam rupiah, bukan cuma nilainya tapi juga kisah perjuangan di balik setiap gambar pahlawan," jelasnya.

Farhan menambahkan, rupiah merupakan simbol identitas dan harga diri bangsa.

"Saya orang Indonesia, uang saya rupiah. Saya pernah ke negara yang tidak punya mata uang sendiri dan pakai dolar Amerika. Mereka melihat wajah George Washington di uangnya, bukan pahlawan mereka. Jadi wajar kalau di setiap lembar rupiah kita ada gambar pahlawan, karena itu identitas kita," ungkapnya.

Pada sesi pembukaan, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak generasi muda untuk meneladani semangat para pahlawan.

"Para pahlawan telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga. Tugas kita hari ini melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga dan mengisi kemerdekaan lewat karya nyata," ucapnya.

Erwan menyampaikan apresiasi atas kerja sama Bank Indonesia dan berbagai pihak dalam kegiatan Rupiah dan Pahlawan yang turut menanamkan semangat kebangsaan di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali mengajak masyarakat untuk semakin mencintai rupiah melalui gerakan Cinta, Bangga, Paham Rupiah.

"Rupiah bukan sekadar alat tukar, bukan hanya angka di dompet

atau saldo digital. Rupiah adalah simbol kedaulatan, pemersatu bangsa, dan wujud nyata kemerdekaan Indonesia," tegasnya.

Ricky juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung terhadap kegiatan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah yang telah dilaksanakan 116 kali dengan total audiens lebih dari orang.

"Kami di Bank Indonesia akan terus menjaga nilai rupiah dan memastikan rupiah tersedia cukup di seluruh penjuru negeri. Bapak-Ibu dan adik-adik generasi muda dapat menjaganya dalam keseharian, baik di dunia nyata maupun digital," ujarnya.

Acara Rupiah dan Pahlawan (Rupawan) yang digagas oleh Bank Indonesia ini berlangsung 6-7 November 2025.

Kegiatan ini juga diisi dengan edukasi soal rupiah bagi generasi muda dan juga dimeriahkan penampilan seru dari Manshur Angklung dan Rizky Febian pada hari kedua.

Wali Kota Bandung Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem

Category: News

8 November 2025



Wali Kota Bandung Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem

Prolite – Menghadapi intensitas hujan yang mulai meningkat, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengimbau seluruh warga untuk lebih waspada terhadap potensi bencana seperti banjir, genangan, dan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem.

Farhan menuturkan, persoalan banjir sering kali terjadi bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga akibat perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan.

“Banjir itu sering kali terjadi karena kesalahan kita bersikap. Ini tanggung jawab kita semua. Pastikan tali air tidak tersumbat, gorong-gorong tidak terhalangi oleh bangunan apa pun, dan pemeliharaan drainase terus digencarkan,” ujar Wali Kota Bandung.



wali Kota Bandung
Muhammad Farhan

Ia juga mengingatkan, agar warga berhati-hati terhadap kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Curah hujan tinggi disertai

angin kencang dapat menyebabkan atap roboh, rumah ambruk, dan pohon tumbang.

"Mari kita jaga bersama dengan sangat hati-hati. Bila warga melihat ada pohon yang dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya, jangan memotong sendiri. Silakan berkoordinasi terlebih dahulu dengan camat atau lurah setempat agar bisa diteruskan kepada DPKP," imbaunya.

Pemkot Bandung memastikan akan terus memperkuat langkah mitigasi bencana dengan membersihkan saluran air, memantau kondisi pohon rawan tumbang, serta menyiagakan petugas kebersihan dan penanganan cepat darurat di tiap wilayah.

Melalui kolaborasi dan kesadaran bersama, Farhan berharap masyarakat dapat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi risiko bencana di musim penghujan.

Jika mengalami kejadian darurat bisa menghubungi layanan kegawatdaruratan melalui 112.

Pemkot Bandung dan Stakeholder Mulai Benahi Kabel Udara Jalan Buahbatu

Category: News
8 November 2025



INFOBANDUNGKOTA

MAX. 100 KG

Pemkot Bandung dan Stakeholder Mulai Benahi Kabel Udara Jalan Buahbatu

KOTA BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jawa Barat dan Pusat melaksanakan pemotongan dan penurunan kabel udara di kawasan Jalan Buahbatu, Kota Bandung, Jumat, 31 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program besar penataan infrastruktur jaringan utilitas agar lebih tertib, aman, dan memperindah wajah kota.

Pada penataan kali ini dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Sekdis Kominfo) Provinsi Jawa Barat Bayu Rakhmana, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Kosasih, Ketua Apjatel Jawa Barat Yudi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Bandung Yayan A. Brilyana.

Sekdis DBMPR Provinsi Jawa Barat Kosasih menegaskan, Pemprov sangat mendukung upaya penataan kabel udara ini.



dok Humas Kota Bandung

Menurutnya, selain menata estetika kota, kegiatan ini juga penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga.

“Kami sangat mendukung program ini, apalagi sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Jawa Barat. Kita harus mulai menata kabel-kabel yang menggantung di atas agar tidak merusak pemandangan dan aktivitas masyarakat. Semuanya diarahkan untuk ditanam di bawah tanah,” jelas Kosasih.

Menurutnya, target keseluruhan penurunan kabel ke bawah tanah masih dalam tahap perumusan karena bergantung pada sinkronisasi dengan program lintas instansi dan operator.

Sedangkan Sekdis Kominfo Jawa Barat Bayu Rakhmana menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan para pelaku industri telekomunikasi.

“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi ini. Ini adalah kerja bersama antara Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, dan asosiasi. Tujuannya untuk menjaga keindahan kota, sekaligus menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain agar melakukan hal serupa,” kata Bayu.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung Yayan A. Brilyana mengungkapkan, masyarakat telah lama menantikan program penurunan kabel udara ini.

Ia memastikan, Pemkot Bandung berkomitmen untuk menata seluruh ruas jalan sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 43 Tahun 2023.

“Kami sangat berbahagia karena akhirnya program penurunan kabel ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada Apjatel, Pemprov, Dinas PU, dan semua pihak yang terlibat. Ada 11 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung dan 15 ruas jalan lainnya yang dibangun oleh BII. Semuanya wajib diturunkan tanpa kecuali,” tegas Yayan.

Khusus untuk ruas Jalan Buahbatu, ia menargetkan pekerjaan bisa rampung dalam waktu dua minggu.

“Untuk Jalan Buahbatu ini, kita targetkan selesai dalam dua minggu. Kita kebut siang malam supaya masyarakat segera merasakan hasilnya,” pungkas Yayan.

NasDem Apresiasi Pemkot Bandung Atas Inisiasi Raperda Ketertiban Umum

Category: News

8 November 2025



NasDem Apresiasi Pemkot Bandung Atas Inisiasi Raperda Ketertiban Umum

BANDUNG, Prolite – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Bandung atas inisiatif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Menurut Rendiana, langkah Pemkot Bandung, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat.

“Penguatan regulasi di bidang ketertiban umum bukan hanya untuk menertibkan aktivitas masyarakat, tetapi juga menjaga kualitas hidup warga, menciptakan rasa aman di ruang publik, dan memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika perkotaan yang kompleks,” ujar Rendiana dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung.

Ia menilai, penyusunan Raperda ini mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap tantangan baru akibat urbanisasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya risiko bencana di wilayah perkotaan. Pendekatan pentahelix yang diatur dalam Raperda, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas masyarakat.

Empat Alasan Urgensi Raperda

Rendiana menjelaskan, Raperda ini mendesak untuk segera disahkan karena beberapa alasan utama:

1. **Dinamika Aktivitas Masyarakat.** Tingginya mobilitas warga menimbulkan potensi gangguan ketertiban seperti kemacetan, kebisingan, dan penataan PKL yang belum tertib.

2. Penyesuaian Regulasi. Diperlukan harmonisasi dengan aturan baru serta antisipasi terhadap penyalahgunaan teknologi.
3. Penguatan Peran Linmas. Linmas berperan penting dalam menjaga keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana.
4. Amanat Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014, ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

Tantangan dan Peluang

Rendiana juga menyoroti tantangan di lapangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel Satpol PP dan Linmas, serta belum optimalnya koordinasi lintas OPD.

Namun, ia menilai masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, terutama melalui penggunaan teknologi digital.

“Kota Bandung bisa memperkuat pengawasan berbasis teknologi seperti pemasangan CCTV, aplikasi pengaduan warga, hingga integrasi data dengan pusat komando Satpol PP. Kolaborasi dengan komunitas dan dunia usaha juga harus diperluas,” katanya.

Substansi dan Rekomendasi

Menurutnya, Raperda ini telah mengatur aspek penting mulai dari asas penyelenggaraan hingga penegakan hukum dan sanksi administratif yang adil.

Fraksi NasDem pun mengajukan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:

1. Mendorong edukasi hukum di sekolah, kampus, dan komunitas.
2. Meningkatkan kapasitas Linmas dengan pelatihan dan peralatan modern.
3. Mengoptimalkan sistem pengawasan digital terintegrasi.

4. Menerapkan pendekatan restoratif terhadap pelanggaran ringan guna membangun kesadaran warga.

Rendiana berharap, Raperda ini dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan Kota Bandung yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

“Keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Ketertiban tidak akan tercapai hanya dengan aturan, tapi dengan kesadaran kolektif untuk menjaga kota ini bersama-sama,” tutupnya.

Menuju Zero Bullying, Pemkot Bandung Lakukan Langkah ini

Category: News

8 November 2025

NO BULLYING !



iStock
Credit: modi-sketch

SAFE SCHOOL ZONE

1482995204

Menuju Zero Bullying, Pemkot Bandung Lakukan Langkah ini

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya mewujudkan lingkungan zero bullying bagi anak-anak. Salah satu langkah strategisnya yaitu dengan mendeklarasikan “Bandung Menuju Zero Bullying”.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati menyampaikan, deklarasi ini menjadi bagian penting dari komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

“Upaya strategis untuk mewujudkan Kota Bandung yang ramah anak kami wujudkan lewat deklarasi Bandung menuju zero bullying di level sekolah dasar. Ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan perundungan,” ujar Uum di SDN 113 Banjarsari, Rabu 29 Oktober 2025.



Humas Kota Bandung

Menurutnya, bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, yang dapat menimbulkan trauma dan rasa tidak berdaya bagi korbannya.

“Perundungan bisa terjadi di mana saja di rumah, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, bahkan di sekolah. Tapi di sekolah, dampaknya bisa lebih besar karena seharusnya sekolah menjadi tempat anak merasa aman, belajar, dan berkembang,” jelasnya.

Karena itu, DP3A menilai penting adanya upaya pencegahan bersama agar tindakan perundungan di lingkungan sekolah dapat ditekan atau dihilangkan sama sekali.

Dalam upaya menuju zero bullying, DP3A Kota Bandung telah menjalankan sejumlah program konkret:

1. Program Senandung Perdana (Sekolah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang telah dilaksanakan di 30 SMP dan 15 SD Negeri di Kota Bandung.
2. Pelatihan pencegahan dan penanganan bullying bagi kepala sekolah dan guru di 60 sekolah SMP Negeri dan Swasta.
3. Konvensi Hak Anak yang diikuti 180 tenaga pendidik, dilaksanakan pada 30 September – 2 Oktober 2025, sebagai salah satu komponen penting menuju sekolah ramah anak.
4. Konvensi Anak untuk forum anak tingkat kecamatan dan kelurahan pada 21 Oktober 2025.

5. Deklarasi dan edukasi sekolah ramah anak di Taruna Bakti pada 10 Oktober 2025.

Puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah penandatanganan dokumen komitmen bersama antara para kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mendukung “Bandung Menuju Zero Bullying”.

“Kami berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran semua pihak baik kepala sekolah, guru, siswa, maupun tenaga kependidikan untuk bersama-sama menciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih, indah, dan bebas dari bullying,” tambahnya.

Melalui deklarasi ini, Pemkot Bandung berharap angka kekerasan di lingkungan pendidikan bisa berkurang secara signifikan.

Lebih jauh, masyarakat juga diharapkan semakin sadar bahwa pencegahan bullying adalah tanggung jawab bersama.

“Kita semua punya peran. Sekolah, orang tua, masyarakat semuanya harus ikut menciptakan lingkungan yang ramah anak. Dari sekolah yang aman dan bebas bullying inilah lahir generasi Bandung yang unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Uum.

Catat ! Pawai Kendaraan Hias di Acara Sumirat Carnival Citylight Bandung Sabtu 25 Oktober 2025

Category: News
8 November 2025



Inagt ! Pawai Kendaraan Hias di Acara Sumirat Carnival Citylight Bandung Sabtu 25 Oktober 2025

Prolite – Weekand kali ini di Kota Bandung akan sangat meriah pasalnya Pawai Kendaraan Hias dalam rangkaian acara Sumirat Carnival Citylight Bandung akan berlangsung pada Sabtu (25/10) .

Pawai Kendaraan Hias yang berlangsung dalam rangkaian cara Sumirat Carnival Citylight Bandung merupakan acara puncak perayaan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-215.

Pawai ini menjadi moment yang ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Kota Bandung maupun wisatawan yang ingin menyaksikan momen tersebut.

Bukan hanya itu pawai ini juga menjadi salah satu rangkaian yang menjadi ikon pada perayaan HJKB setiap tahunnya.

Keseruan Sumirat Carnival Citylight Bandung akan berlangsung mulai dari – WIB.



Logo HJKB ke-215

Bukan hanya pawai kendaraan hias saja namun sejumlah bintang tamu akan meramaikan acara di panggung hiburan di Lapangan Tegallega.

Panggung hiburan musik ini bisa disaksikan oleh warga secara gratis tanpa dipungut biaya dengan bintang tamu seperti Gigi, PAS Band, Kuburan, PHB, The Bomb, Musisi Bandung Pisan & Tikpul, Pemuda Pemandu Lagu & Givani Gumilang.

Titik awal mulai pawai kendaraan hias dari Balai Kota Bandung pada pukul WIB dan berakhir di Lapangan Tegallega.

Berbeda dengan perayaan tahun kemarin untuk tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berlangsung malam hari dengan konsep Bandung Menyala.

Konsep Bandung Menyala ini akan memanjakan mata warga dengan gemerlap cahaya lampu di sepanjang rute pawai.

“Kita akan mulai setelah maghrib tanggal 25 Oktober. Pawai mobil hias HJKB ini semuanya menggunakan lampu jadi pawai bercahaya,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Kamis (23/10/2025).

Nantinya, pawai kendaraan hias ini akan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, dan organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, BUMD, komunitas kreatif, hingga kelompok seni lokal.

“Pesertanya dari seluruh OPD, komunitas, kecamatan, dan BUMD. Pokoknya semua ikut menyala,” katanya.

Sementara untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan warga, pihaknya tidak mengundang peserta dari luar

kota karena mempertimbangkan kondisi arus lalu lintas agar tidak terlalu mengalami kemacetan.

Dalam pawai nanti, setiap kendaraan hias akan menampilkan tema berbeda, mulai dari sejarah Kota Bandung, inovasi pembangunan, budaya Sunda, hingga semangat keberlanjutan lingkungan.

Fraksi Nasdem DPRD Kota Bandung beri Pandangan Terkait 4 Raperda yang Diajukan Pemkot Bandung

Category: News

8 November 2025



Fraksi Nasdem DPRD Kota Bandung beri Pandangan Terkait 4 Raperda yang Diajukan Pemkot Bandung

BANDUNG, Prolite – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kota Bandung. Empat Raperda tersebut dianggap sebagai kebijakan strategis yang akan menentukan arah pembangunan Kota Bandung di masa mendatang.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, mengatakan bahwa pembahasan empat Raperda ini tidak bisa dipandang sebagai proses administratif semata. Menurutnya,

kehadiran Raperda tersebut menjadi fondasi kebijakan untuk melindungi, mengatur, dan memajukan masyarakat Kota Bandung.

“Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Bandung akan menyampaikan pokok pikiran terhadap empat Raperda yang diajukan pemerintah daerah untuk dibahas bersama,” ujar Rendiana Awangga.

Rendiana menambahkan, keempat Raperda mencakup kebijakan yang luas, mulai dari perlindungan kesehatan dan moral generasi muda, penataan ketertiban umum, pengelolaan pembangunan kependudukan jangka panjang, hingga penguatan sistem kesejahteraan sosial yang lebih responsif.

“Regulasi yang dihasilkan nantinya bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan komitmen politik dan moral pemerintah serta DPRD terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

- **Apresiasi terhadap Raperda Grand Design Pembangunan Keluarga**

Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung atas penyusunan Raperda tentang Grand Design Pembangunan Keluarga (GDPK) Kota Bandung Tahun 2025–2045.

Raperda tersebut dinilai sebagai peta jalan strategis pembangunan jangka panjang di bidang kependudukan, yang terintegrasi dengan RPJPD Kota Bandung 2025–2045 dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

“Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi tantangan demografi sekaligus memanfaatkan bonus demografi secara optimal,” ungkap Rendiana.

Fraksi NasDem menilai, lima pilar GDPK—yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta

penataan administrasi kependudukan—merupakan kerangka menyeluruh dalam menciptakan penduduk yang seimbang, berkualitas, dan berdaya saing.

▪ **Soroti Tantangan dan Peluang**

Dalam pembahasannya, Fraksi NasDem menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan GDPK 2025–2045. Di antaranya, laju pertumbuhan penduduk yang menekan ketersediaan lahan, air bersih, dan energi; ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah; serta tingginya tingkat urbanisasi yang dapat meningkatkan kerentanan keluarga.

Meski demikian, Fraksi NasDem juga menyoroti berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Antara lain bonus demografi yang sedang berlangsung, kemajuan teknologi digital untuk mendukung administrasi kependudukan dan layanan publik, serta potensi ekonomi kreatif sebagai sektor penyerap tenaga kerja produktif.

▪ **Rekomendasi Strategis**

Fraksi NasDem juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan GDPK di Kota Bandung, antara lain:

Mendorong program keluarga berencana inklusif dengan pemantauan kelahiran secara real-time.

Memperluas akses pendidikan vokasi, layanan kesehatan preventif, dan literasi digital untuk meningkatkan kualitas penduduk.

Menguatkan pembinaan keluarga dan layanan konseling di tingkat kelurahan.

Mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan tata ruang wilayah (RT/RW).

Mempercepat digitalisasi layanan administrasi kependudukan

serta peningkatan kapasitas aparatur daerah.

“Fraksi NasDem berharap, pembahasan Raperda ini dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat Kota Bandung,” pungkas Rendiana.

Satgas MBG akan Dibentuk Pemkot Bandung untuk Meningkatkan Mutu

Category: News

8 November 2025



Satgas MBG akan Dibentuk Pemkot Bandung untuk Meningkatkan Mutu

Prolite – Korban keracunan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya di Jawa Barat menjadi yang tertinggi hingga saat ini.

Oleh karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen meningkatkan mutu tata Kelola dan pelayanan MBG.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menggandeng para ahli gizi, mitra, serta Satuan Pelayaan Pangan dan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Jawa Barat dalam rangka peningkatan tata kelola MBG yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul, Bogor, pada Senin 13 Oktober 2025 kemarin.



Wakil Wali Kota Bandung, Erwin

“Kita semua harus menjaga agar tidak ada lagi kasus keracunan pada siswa-siswi. Distribusi makanan harus terkelola dengan baik, dan kualitasnya harus terus dijaga,” ujar Erwin.

Erwin mengatakan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap kota dan kabupaten sebagai langkah nyata untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

“Semua daerah harus membentuk Satgas MBG, ini akan kita upayakan. Jangan sampai ada kasus keracunan lagi. Tingkatkan kualitas makanan dan pastikan distribusi menu gizi seimbang berjalan dengan baik. Saya yakin semua harus jalan bersama-sama,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Bandung berencana mendorong penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia makanan dalam program Makan

Bergizi Gratis.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah.

Kegiatan konsolidasi regional tersebut menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan Kepala SPPG, ahli gizi, mitra, serta pemerintah daerah untuk membangun pemahaman bersama dalam peningkatan mutu tata kelola program MBG.

Rapat di Sentul tersebut merupakan seri ketiga dari rangkaian konsolidasi regional setelah sebelumnya dilaksanakan di Semarang (wilayah Jawa Tengah dan DIY) serta di Surabaya (wilayah Jawa Timur).

DPRD Kota Bandung Tetapkan 3 Perda dalam Rapat Paripurna ke-6

Category: News

8 November 2025



DPRD Kota Bandung Tetapkan 3 Perda dalam Rapat

Paripurna ke-6

BANDUNG – DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmen memperkuat tata kelola kota yang inklusif melalui penetapan tiga peraturan daerah (Perda) baru yang disahkan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (7/10/2025).

Ketiga perda ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat aspek sosial, keagamaan, dan pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengatakan penetapan tiga perda tersebut merupakan hasil pembahasan panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah dan masyarakat.

“Pembahasan dilakukan secara mendalam dan penuh tanggung jawab. Semua perda ini diarahkan agar kebijakan pembangunan di Kota Bandung semakin berpihak pada kesejahteraan warga,” ujar Asep.

Salah satu perda yang disahkan mengatur penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, serta fasilitas umum perumahan. Melalui perda ini, pemerintah menegaskan kewajiban pengembang menyerahkan fasilitas publik – seperti jalan lingkungan, taman, dan drainase – kepada pemerintah kota, sehingga masyarakat dapat menikmati sarana umum yang layak dan terawat.

Selain itu, perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren menjadi wujud dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Regulasi ini tak hanya memperhatikan aspek pendidikan dan sosial, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi pesantren agar mampu berkontribusi pada pembangunan kota.

Sementara itu, perda tentang toleransi kehidupan bermasyarakat menjadi tonggak penting dalam menjaga keharmonisan sosial di

tengah keberagaman warga Bandung. Aturan ini diharapkan dapat memperkuat nilai moderasi beragama serta mendorong kolaborasi lintas komunitas.

Tiga perda yang disetujui secara aklamasi ini dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi hukum bagi pembangunan kota yang inklusif, tertib, dan berkeadilan.

Usai penetapan perda, DPRD Kota Bandung juga resmi membubarkan Panitia Khusus (Pansus) 7, 8, dan 9 sebagai tanda selesainya pembahasan tahap pertama tahun ini.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap perda yang lahir benar-benar mencerminkan semangat gotong royong dan keadilan sosial. Inilah arah pembangunan Bandung yang ingin kita wujudkan,” tutup Asep.

Rapat paripurna pun dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap empat Raperda baru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahap II Tahun 2025. Setiap fraksi memberikan catatan strategis agar regulasi yang dibahas ke depan semakin adaptif terhadap kebutuhan warga.